



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.350.202.000.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) berkurang sejumlah Rp141.642.924.480,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.208.559.075.520,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp 1,217,200,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (165,096,967,340.59)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 1,052,103,032,659.41

b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Surplus/(Defisit)		
Setelah Perubahan	Rp	1,052,103,032,659.41

Pembiayaan:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp	138,002,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20,644,042,860.59</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	158,646,042,860.59

b. Pengeluaran:

1. Semula	Rp	138,002,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20,644,042,860.59</u>
jumlah setelah perubahan	Rp	158,646,042,860.59
sisa pembiayaan neto		
setelah perubahan	Rp	-
sisa lebih pembiayaan		
anggaran setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Pendapat Asli Daerah:

1. Semula	Rp	76,718,528,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(6,482,897,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	70,235,630,500.00

Dana Perimbangan:

1. Semula	Rp	966,769,081,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(153,539,669,587.59)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	813,229,411,412.41

Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. Semula	Rp	173,712,391,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(5,074,400,253.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	168,637,990,747.00

Pendapatan asli daerah terdiri dari jenis pendapatan:

Pajak daerah:

1. Semula	Rp	13,550,195,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(6,442,307,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	7,107,887,500.00

Retribusi daerah:

1. Semula	Rp	506,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	506,000,000.00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp	10,539,837,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	10,539,837,000.00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. Semula	Rp	52,122,496,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(40,590,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	52,081,906,000.00

Dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

Dana bagi hasil:

1. Semula	Rp	390,206,507,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(65,957,388,587.59)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	324,249,118,412.41

Dana alokasi umum:

1. Semula	Rp	445,495,296,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(47,709,592,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	397,785,704,000.00

Dana alokasi khusus sejumlah:

1. Semula	Rp	131,067,278,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(39,872,689,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	91,194,589,000.00

Lain-lain pendapatan daerah

terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah:

1. Semula	Rp	11,252,180,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	11,252,180,000.00

Dana darurat:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Lainnya:

1. Semula	Rp	64,558,001,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(734,379,253.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	63,823,621,747.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>500,000,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	500,000,000.00

Lain-lain Penerimaan

1. Semula	Rp	97,902,210,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(4,840,021,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	93,062,189,000.00

Pasal 3

Belanja daerah terdiri dari :

1. Semula	Rp	534,683,756,504.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>53,403,565,792.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	588,087,322,296.00

Belanja Langsung sejumlah:

1. Semula	Rp	815,518,243,496.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(192,856,490,272.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	622,661,753,224.00

Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja pegawai:

1. Semula	Rp	345,946,201,906.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>46,612,707,901.34</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	392,558,909,807.34

Belanja bunga:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja subsidi:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja hibah:

1. Semula	Rp	37,170,857,098.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(369,599,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	36,801,258,098.00

Belanja bantuan sosial:

1. Semula	Rp	500,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2,749,100,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	3,249,100,000.00

Belanja bagi hasil:

1. Semula	Rp	1,509,156,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(754,174,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	754,982,000.00

Belanja bantuan keuangan:

1. Semula	Rp	149,057,541,500.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(11,921,075,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	137,136,466,000.00

Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp	500,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17,086,606,390.66</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	17,586,606,390.66

Belanja langsung terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai sejumlah:

1. Semula	Rp	91,171,773,640.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23,480,861,585.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	114,652,635,225.00

Belanja barang dan jasa sejumlah:

1. Semula	Rp	409,906,742,376.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(98,676,219,114.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	311,230,523,262.00

Belanja modal sejumlah:

1. Semula	Rp	314,439,727,480.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(117,661,132,743.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	196,778,594,737.00

Pasal 4

Pembiayaan daerah terdiri dari:

Penerimaan:

1. Semula	Rp	1,350,202,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(139,452,924,480.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1,210,749,075,520.00

Pengeluaran:

1. Semula	Rp	138,002,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5,261,918,485.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	143,263,918,485.00

Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

1. Semula	Rp (133,002,000,000.00)
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(25,644,042,860.59)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp (158,646,042,860.59)

Pencairan dana cadangan;

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Penerimaan pinjaman daerah:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Penerimaan kembali pemberian pinjaman:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Penerimaan piutang daerah:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan:

Pembentukan dana cadangan:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp _____ -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp -

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

1. Semula	Rp -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>5,261,918,485.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 5,261,918,485.00

Pembayaran pokok utang:

1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Pemberian pinjaman daerah:		
1. Semula	Rp	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Natuna dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dimuat dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan dan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

Pengeluaran keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Natuna dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal, 24 Agustus 2020

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 24 Agustus 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU (5 / 17 / 2020)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	76,718,528,000.00	70,235,630,500.00	(6,482,897,500.00)	(8.45)
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,550,195,000.00	10,678,400,000.00	(2,871,795,000.00)	(21.19)
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	441,000,000.00	(65,000,000.00)	(12.85)
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00	7,028,824,500.00	(3,511,012,500.00)	(33.31)
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,122,496,000.00	52,087,406,000.00	(35,090,000.00)	(0.07)
4. 2.	Dana Perimbangan	966,769,081,000.00	813,229,411,412.41	(153,539,669,587.59)	(15.88)
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,206,507,000.00	324,249,118,412.41	(65,957,388,587.59)	(16.90)
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(10.71)
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	131,067,278,000.00	91,194,589,000.00	(39,872,689,000.00)	(30.42)
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	173,712,391,000.00	168,637,990,747.00	(5,074,400,253.00)	(2.92)
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	0	0
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64,558,001,000.00	63,823,621,747.00	(734,379,253.00)	(1.14)
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	500,000,000.00	500,000,000.00	0
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	97,902,210,000.00	93,062,189,000.00	(4,840,021,000.00)	(4.94)
	Jumlah	1,217,200,000,000.00	1,052,103,032,659.41	(165,096,967,340.59)	(13.56)
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	534,683,756,504.00	588,087,322,296.00	53,403,565,792.00	9.99
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	392,558,909,807.34	46,612,707,901.34	13.47
5. 1. 4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	3,249,100,000.00	2,749,100,000.00	549.82
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	754,982,000.00	(754,174,000.00)	(49.97)
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	137,136,466,000.00	(11,921,075,500.00)	(8.00)
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	17,586,606,390.66	17,086,606,390.66	3,417.32
5. 2.	Belanja Langsung	815,518,243,496.00	622,661,753,224.00	(192,856,490,272.00)	(23.65)
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,171,773,640.00	114,652,635,225.00	23,480,861,585.00	25.75
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	409,906,742,376.00	311,230,523,262.00	(98,676,219,114.00)	(24.07)
5. 2. 3.	Belanja Modal	314,439,727,480.00	196,778,594,737.00	(117,661,132,743.00)	(37.42)
	Jumlah	1,350,202,000,000.00	1,210,749,075,520.00	(139,452,924,480.00)	(10.33)
	Surplus / (Defisit)	(133,002,000,000.00)	(158,646,042,860.59)	(25,644,042,860.59)	19.28
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	0
	Jumlah	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Pembiayaan neto	133,002,000,000.00	158,646,042,860.59	25,644,042,860.59	19.28
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0	0	0	0

AS I BUPATI NATUNA, *Sekda*

keas ABDUL HAMID RIZAL

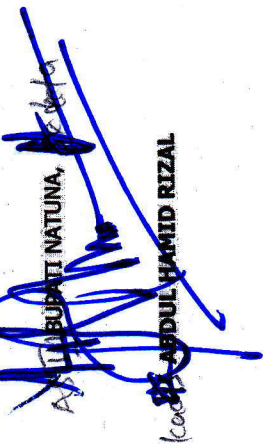


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2020

kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan					Belanja						Bertambah / (Berkurang)				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		%	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
				Rp	Rp		Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Rp	Rp	Tidak Langsung	Langsung	Rp	Rp	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	Rp	%	14			
1.	URUSAN WAJIB	21,955,787,600.00	22,900,787,600.00	(55,000,000.00)	(0.24)	231,508,563,502.00	596,334,582,497.00	817,843,145,999.00	257,758,895,987.72	450,421,334,585.00	708,180,230,572.72	(119,662,915,426.28)	(14.45)				
1.01.	PENDIDIKAN	0	0	0	0	132,041,044,282.00	121,283,971,568.00	253,325,015,850.00	123,609,642,075.08	86,600,335,397.00	210,209,977,472.08	(43,115,038,377.92)	(17.02)				
1.01.01.	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	129,620,896,282.00	106,072,796,764.00	235,693,693,046.00	119,236,255,898.08	78,360,344,169.00	197,599,096,067.08	(38,094,596,978.92)	(16.16)				
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	2,420,148,000.00	15,211,174,804.00	4,373,386,177.00	7,631,322,804.00	8,237,495,228.00	12,610,881,405.00	(5,020,441,399.00)	(28.47)				
1.02.	KESEHATAN	22,725,787,600.00	22,725,787,600.00	0	0	40,568,596,320.00	110,905,026,313.00	151,473,622,633.00	56,700,615,449.00	141,839,917,331.00	198,540,532,780.00	47,066,910,147.00	31.07				
1.02.01.	Dinas Kesehatan	22,725,787,600.00	22,725,787,600.00	0	0	40,568,596,320.00	110,905,026,313.00	151,473,622,633.00	56,700,615,449.00	141,839,917,331.00	198,540,532,780.00	47,066,910,147.00	31.07				
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	6,154,384,500.00	121,976,535,185.00	128,130,919,685.00	7,272,019,320.00	47,820,726,383.00	55,092,745,703.00	(73,038,173,982.00)	(57.00)				
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	6,154,384,500.00	121,976,535,185.00	128,130,919,685.00	7,272,019,320.00	47,820,726,383.00	55,092,745,703.00	(73,038,173,982.00)	(57.00)				
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0	3,869,876,000.00	157,121,343,075.00	160,991,219,075.00	5,926,170,290.00	114,705,943,368.00	120,632,113,658.00	(40,359,105,417.00)	(25.07)				
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0	3,869,876,000.00	157,121,343,075.00	160,991,219,075.00	5,926,170,290.00	114,705,943,368.00	120,632,113,658.00	(40,359,105,417.00)	(25.07)				
1.05.	KETERANGAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	0	0	0	14,540,536,400.00	16,887,784,756.00	31,428,321,156.00	18,957,378,589.00	16,008,116,499.00	34,965,495,088.00	3,537,173,932.00	11.25				
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0	0	0	0	3,353,633,000.00	3,465,798,465.00	6,819,431,465.00	4,342,886,999.00	2,743,427,860.00	7,086,314,859.00	266,883,394.00	3.91				
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	7,329,184,200.00	7,793,072,205.00	15,122,256,405.00	10,182,315,201.00	8,156,369,153.00	18,338,684,354.00	3,216,427,949.00	21.27				
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	3,857,719,200.00	5,628,914,086.00	9,486,633,286.00	4,432,176,389.00	5,108,319,486.00	9,540,495,875.00	53,862,589.00	0.57				
1.06.	SOSIAL	0	0	0	0	2,420,148,000.00	2,023,140,874.00	4,443,288,874.00	3,039,820,888.50	1,586,087,946.00	4,625,908,834.50	182,619,960.50	4.11				
1.06.01.	Dinas Sosial	0	0	0	0	2,420,148,000.00	2,023,140,874.00	4,443,288,874.00	3,039,820,888.50	1,586,087,946.00	4,625,908,834.50	182,619,960.50	4.11				
1.07.	TENAGA KERJA	0	0	0	0	3,820,464,000.00	4,474,575,373.00	8,295,039,373.00	4,641,028,935.00	2,502,408,768.00	7,143,437,703.00	(1,151,601,670.00)	(13.88)				
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	3,820,464,000.00	4,474,575,373.00	8,295,039,373.00	4,641,028,935.00	2,502,408,768.00	7,143,437,703.00	(1,151,601,670.00)	(13.88)				
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	2,903,128,000.00	9,763,311,594.00	12,666,439,594.00	3,532,635,926.00	7,903,287,508.00	11,435,923,434.00	(1,230,516,160.00)	(9.71)				
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	2,903,128,000.00	9,763,311,594.00	12,666,439,594.00	3,532,635,926.00	7,903,287,508.00	11,435,923,434.00	(1,230,516,160.00)	(9.71)				
1.09.	PANGAN	0	0	0	0	2,941,422,000.00	3,167,945,343.00	6,109,367,343.00	4,157,677,477.00	2,057,904,487.00	6,215,581,964.00	106,214,621.00	1.74				

kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan						Belanja								Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Rp		Rp		Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Rp	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Rp	%	
		3		4		5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14		
1	2																

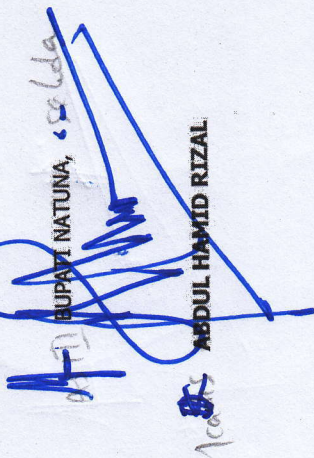

 Abdul Hamid Rizal

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. Dinas Pendidikan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
1	2	3	4	5		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.01.1.01.01.00.00	5.				BELANJA	235,693,693,046.00	197,599,096,067.08	5=4-3 (38,094,596,978.92)	6 (16.16)	7
1.01.1.01.01.00.00	5.1.				Belanja Tidak Langsung	129,620,896,282.00	119,236,255,898.08	(10,384,640,383.92)	(8.01)	
1.01.1.01.01.00.00	5.1.1.				Belanja Pegawai	129,620,896,282.00	119,236,255,898.08	(10,384,640,383.92)	(8.01)	
1.01.1.01.01.01.01.	5.2.				Belanja Langsung	106,072,796,764.00	78,362,840,169.00	(27,709,956,595.00)	(26.12)	
1.01.1.01.01.01.01.					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,095,424,000.00	16,809,608,000.00	1,714,184,000.00	11.36	
1.01.1.01.01.01.01.					Penyediaan jasa surat menyurat	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	(25.00)	
1.01.1.01.01.01.01.					Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	(25.00)	
1.01.1.01.01.01.02.					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127,300,000.00	48,000,000.00	(79,300,000.00)	(62.29)	
1.01.1.01.01.01.02.					Belanja Barang dan Jasa	127,300,000.00	48,000,000.00	(79,300,000.00)	(62.29)	
1.01.1.01.01.01.07.					Penyediaan jasa administrasi keuangan	252,950,000.00	185,000,000.00	(67,950,000.00)	(26.86)	
1.01.1.01.01.01.07.					Belanja Barang dan Jasa	252,950,000.00	185,000,000.00	(67,950,000.00)	(26.86)	
1.01.1.01.01.01.08.					Penyediaan jasa kebersihan kantor	63,400,000.00	63,400,000.00	0.00	0	
1.01.1.01.01.01.08.					Belanja Barang dan Jasa	63,400,000.00	63,400,000.00	0.00	0	
1.01.1.01.01.01.10.					Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0	
1.01.1.01.01.01.10.					Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0	
1.01.1.01.01.01.11.					Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	55,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	9.09	
1.01.1.01.01.01.11.					Belanja Barang dan Jasa	55,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	9.09	
1.01.1.01.01.01.13.					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	257,536,000.00	550,174,000.00	292,638,000.00	113.63	
1.01.1.01.01.01.13.					Belanja Barang dan Jasa	32,000,000.00	1,000,000.00	(31,000,000.00)	(96.93)	
1.01.1.01.01.01.13.					Belanja Modal	224,536,000.00	549,174,000.00	324,638,000.00	144.15	
1.01.1.01.01.01.15.					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7



 BUPATI NATUNA, *solda*



 ABDUL HAMID RIZAL

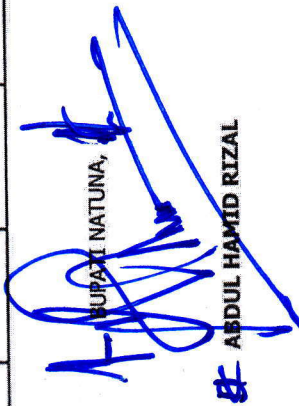


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja		Jumlah	Modal	Jenis Belanja		Jumlah	Modal	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa			Pegawai	Barang dan Jasa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-6	12
1.	URUSAN WAJIB	62,714,456,640.00	245,375,432,543.00	292,184,476,314.00	600,274,365,497.00	82,412,645,225.00	186,554,988,432.00	183,590,471,262.00	452,558,104,919.00	(147,716,260,578.00)	(24.61)
1.01	PENDIDIKAN	17,457,735,233.00	65,153,958,217.00	261,128,893,988.00	106,740,587,438.00	26,041,029,033.00	32,579,440,939.00	16,932,004,050.00	75,952,474,072.00	(32,788,113,416.00)	(30.15)
1.01.01	Dinas Pendidikan (1.01.01.)	16,949,385,333.00	62,994,517,543.00	26,128,893,988.00	106,072,796,764.00	25,646,979,033.00	31,827,223,391.00	16,101,814,050.00	73,576,016,474.00	(32,496,780,290.00)	(30.64)
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,157,200,000.00	2,713,288,000.00	224,936,000.00	15,095,424,000.00	14,367,600,000.00	1,892,834,000.00	549,174,000.00	16,809,608,000.00	1,714,184,000.00	11.36
1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	(25.00)
1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0.00	127,300,000.00	0.00	127,300,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	(79,300,000.00)	(62.29)
1.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0.00	252,950,000.00	0.00	252,950,000.00	0.00	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	(67,950,000.00)	(26.86)
1.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0.00	63,400,000.00	0.00	63,400,000.00	0.00	63,400,000.00	0.00	63,400,000.00	0.00	0
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan alat tulis kantor	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	5,000,000.00	9.09
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	32,600,000.00	224,936,000.00	257,536,000.00	0.00	1,000,000.00	549,174,000.00	550,174,000.00	292,638,000.00	113.63
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan makanan dan minuman	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0.00	511,850,000.00	0.00	511,850,000.00	0.00	300,050,000.00	0.00	300,050,000.00	(211,800,000.00)	(41.38)
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/kebis perkantoran	12,157,200,000.00	765,990,000.00	0.00	12,923,190,000.00	14,367,600,000.00	765,990,000.00	0.00	15,133,590,000.00	2,210,400,000.00	17.10
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	0.00	744,198,000.00	0.00	744,198,000.00	0.00	324,394,000.00	0.00	324,394,000.00	(419,804,000.00)	(56.41)
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	197,000,000.00	1,464,928,000.00	1,661,928,000.00	0.00	117,000,000.00	475,690,000.00	592,690,000.00	(1,069,238,000.00)	(64.34)
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0.00	0.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000,000.00)	(100.00)
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan mebeleur	0.00	0.00	76,690,000.00	76,690,000.00	0.00	0.00	76,690,000.00	76,690,000.00	0.00	0
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0.00	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	(80,000,000.00)	(48.48)
1.01	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0
1.01	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	0.00	2,000,000.00	338,238,000.00	340,238,000.00	0.00	2,000,000.00	399,000,000.00	401,000,000.00	60,762,000.00	17.86

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Modal	Pegawai	Jenis Belanja			Jumlah	Modal	Pegawai	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal				Pegawai	Barang dan Jasa	Modal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-6	12	13	14	15	16
3. 05. 3.05.21. 02.	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3. 05. 3.05.21. 02.	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3. 05. 3.05.21. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3. 05. 3.05.21. 05.	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3. 05. 3.05.21. 06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
3. 05. 3.05.21. 06.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
3. 05. 3.05.21. 07.	Program Pembinaan Keagamaan	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,675,000.00	0.00	0.00	0.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
3. 05. 3.05.21. 07.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,675,000.00	0.00	0.00	0.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
3. 05. 3.05.21. 30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	23,350,000.00	228,116,680.00	0.00	251,466,680.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	216,116,680.00	0.00	0.00	0.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
3. 05. 3.05.21. 30.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	23,350,000.00	228,116,680.00	0.00	251,466,680.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	216,116,680.00	0.00	0.00	0.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
3. 05. 3.05.21. 30.	JUMLAH	20,123,150,000.00	111,251,137,560.00	13,922,972,945.00	145,297,260,505.00	21,755,700,000.00	21,755,700,000.00	7,233,174,885.00	94,060,036,180.00	7,233,174,885.00	123,048,911,065.00	123,048,911,065.00	22,248,349,440.00	(15.31)	(15.31)
	TOTAL JUMLAH	91,171,773,640.00	409,906,742,376.00	314,439,777,480.00	815,518,243,496.00	114,652,635,225.00	114,652,635,225.00	196,778,594,737.00	622,661,753,224.00	196,778,594,737.00	622,661,753,224.00	622,661,753,224.00	192,856,490,272.00	(23.65)	(23.65)



 BUPATI NATUNA,



 ABDUL HAMID RIZAL



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELERASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (BerKurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
01.	PELAYANAN UMUM	481,749,701,127.00	466,730,908,690.95	(15,018,792,436.05)	(3.12)
01. 1. 16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	11,464,723,612.00	7,756,669,716.00	(3,708,053,896.00)	(32.34)
01. 1. 20.	STATISTIK	128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
01. 1. 24.	KEARSIPAN	1,011,874,000.00	411,979,600.00	(599,894,400.00)	(59.29)
01. 3. 01.	PERENCANAAN	14,008,156,927.00	13,281,355,821.00	(726,801,106.00)	(5.19)
01. 3. 02.	KEUANGAN	222,118,283,340.00	226,243,887,745.44	4,125,604,405.44	1.86
01. 3. 03.	KEPEGAWAJAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12,872,200,339.00	10,427,538,567.81	(2,444,661,771.19)	(18.99)
01. 3. 04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	817,584,000.00	339,115,000.00	(478,469,000.00)	(58.52)
01. 3. 05.	FUNGSI LAIN	219,328,065,909.00	208,253,668,240.70	(11,074,397,668.30)	(5.05)
03.	KETERLIBATAN DAN KETENTRAMAN	31,402,861,156.00	34,956,235,088.00	3,553,373,932.00	11.32
03. 1. 05.	KETERLIBATAN, KETERLIBATAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31,402,861,156.00	34,956,235,088.00	3,553,373,932.00	11.32
04.	EKONOMI	101,646,466,536.00	85,898,173,342.47	(15,748,293,193.53)	(15.49)
04. 1. 07.	TENAGA KERJA	7,761,197,373.00	6,878,158,703.00	(883,038,670.00)	(11.38)
04. 1. 09.	PANGAN	6,109,367,343.00	6,215,581,964.00	106,214,621.00	1.74
04. 1. 13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,756,362,207.00	8,597,988,969.99	(158,373,237.01)	(1.81)
04. 1. 15.	PERHUBUNGAN	19,742,523,202.00	13,713,610,316.00	(6,028,912,886.00)	(30.54)
04. 1. 17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,221,788,000.00	586,391,534.00	(635,396,466.00)	(52.01)
04. 1. 18.	PENANAMAN MODAL	8,780,447,925.00	8,019,932,617.15	(760,515,307.85)	(8.66)
04. 2. 01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,334,407,205.00	11,030,231,669.00	(1,304,175,536.00)	(10.57)
04. 2. 02.	PARIWISATA	15,722,128,912.00	12,772,065,102.00	(2,950,063,810.00)	(18.76)
04. 2. 03.	PERTANIAN	12,633,848,118.00	10,257,259,022.00	(2,376,589,096.00)	(18.81)

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
04. 2. 04.	PERDAGANGAN	7,250,960,251.00	7,080,276,445.33	(170,683,805.67)	(2.35)
04. 2. 05.	PERINDUSTRIAN	799,594,000.00	481,398,000.00	(318,196,000.00)	(39.79)
04. 2. 06.	TRANSMIGRASI	533,842,000.00	265,279,000.00	(268,563,000.00)	(50.31)
05. 1. 05.	LINGKUNGAN HIDUP	23,211,347,411.00	16,174,280,330.00	(7,037,067,081.00)	(30.32)
05. 1. 10.	PERTANAHAN	13,733,067,000.00	6,326,708,000.00	(7,406,359,000.00)	(53.93)
05. 1. 11.	LINGKUNGAN HIDUP	9,478,280,411.00	9,847,572,330.00	369,291,919.00	3.90
06. 1. 06.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	266,574,298,760.00	165,748,345,361.00	(100,825,953,399.00)	(37.82)
06. 1. 03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128,130,919,685.00	55,092,745,703.00	(73,038,173,982.00)	(57.00)
06. 1. 04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	138,443,379,075.00	110,655,599,658.00	(27,787,779,417.00)	(20.07)
07. 1. 07.	KESEHATAN	157,084,974,133.00	203,554,137,680.00	46,469,163,547.00	29.58
07. 1. 02.	KESEHATAN	151,473,622,633.00	198,540,532,780.00	47,066,910,147.00	31.07
07. 1. 14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,611,351,500.00	5,013,604,900.00	(597,746,600.00)	(10.65)
08. 1. 08.	PARIWISATA DAN BUDAYA	2,334,585,000.00	851,794,000.00	(1,482,791,000.00)	(63.51)
08. 1. 22.	KEBUDAYAAN	2,334,585,000.00	851,794,000.00	(1,482,791,000.00)	(63.51)
10. 1. 10.	PENDIDIKAN	259,221,485,964.00	215,665,523,603.08	(43,555,962,360.92)	(16.80)
10. 1. 01.	PENDIDIKAN	240,781,631,720.00	199,562,116,097.08	(41,219,515,622.92)	(17.12)
10. 1. 19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12,543,384,130.00	10,647,861,375.00	(1,895,522,755.00)	(15.11)
10. 1. 23.	PERPUSTAKAAN	5,896,470,114.00	5,455,546,131.00	(440,923,983.00)	(7.48)
11. 1. 11.	PERLINDUNGAN SOSIAL	26,976,279,913.00	21,169,677,424.50	(5,806,602,488.50)	(21.52)
11. 1. 06.	SOSIAL	13,258,061,874.00	8,275,714,834.50	(4,982,347,039.50)	(37.58)
11. 1. 08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,055,088,094.00	6,422,318,534.00	(632,769,560.00)	(8.97)
11. 1. 12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6,663,129,945.00	6,471,644,056.00	(191,485,889.00)	(2.87)
JUMLAH TOTAL		1,350,202,000,000.00	1,210,749,075,520.00	(139,452,924,480.00)	(10.33)

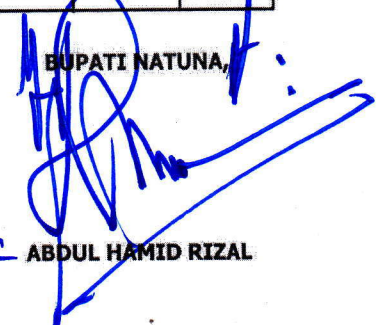
ABDUL HAMID RIZAL
 BUPATI NATUNA



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Golongan Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	1	2
Golongan IV/c	0	17	0	0	0	0	1	18
Golongan IV/b	0	13	32	0	0	4	5	54
Golongan IV/a	0	1	71	8	0	109	21	210
Jumlah Golongan IV	0	32	103	8	0	113	28	284
Golongan III/d	0	0	39	152	0	94	30	315
Golongan III/c	0	0	4	154	0	172	14	344
Golongan III/b	0	0	0	64	1	263	134	462
Golongan III/a	0	0	0	24	0	219	200	443
Jumlah Golongan III	0	0	43	394	1	748	378	1,564
Golongan II/d	0	0	0	0	0	78	214	292
Golongan II/c	0	0	0	0	0	41	301	342
Golongan II/b	0	0	0	0	0	16	72	88
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	84	84
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	135	671	806
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	10	10
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	20	20
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	4	4
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	40	40
Total	0	32	146	402	1	996	1,117	2,694

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang s.d Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7
			NIHIL			

ABDUL HAMID RIZAL



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah Diserikan sampai T.A. Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Telah Diserikan s.d. Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Diserikan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akut Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Telah Diserikan s.d. Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2001	RAL	APBD 2001	P. MODAL	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	NIHIL	1,500,000,000	0
2	2001	PERUSDA	APBD 2001	P. MODAL	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	NIHIL	500,000,000	0
3	2002	PERUSDA	APBD 2002	P. MODAL	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	NIHIL	500,000,000	0
4	2003	BANK RIAU	APBD 2003	P. MODAL	6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	DEVIDEN	6,000,000,000	0
5	2003	PERUSDA	APBD 2003	P. MODAL	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	NIHIL	500,000,000	0
6	2004	PERUSDA	APBD 2004	P. MODAL	4,687,472,016	4,687,472,016	0	4,687,472,016	0	NIHIL	500,000,000	4,187,472,016
7	2004	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2004	P. MODAL	3,326,337,005	3,326,337,005	0	3,326,337,005	0	DEVIDEN	9,000,000,000	3,326,337,005
8	2006	BANK RIAU	APBD 2006	P. MODAL	9,000,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	DEVIDEN	5,000,000,000	0
9	2006	PERUSDA	APBD 2006	P. MODAL	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	NIHIL	8,000,000,000	0
10	2007	RAL	APBD 2007	P. MODAL	8,000,000,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000	0	NIHIL	25,500,000,000	0
11	2007	PERUSDA	APBD 2007	P. MODAL	25,500,000,000	25,500,000,000	0	25,500,000,000	0	0	617,842,000	0
12	2009	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2009	P. MODAL	617,842,000	617,842,000	0	617,842,000	0	0	0	15,000,000,000
13	2010	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2010	P. MODAL	15,000,000,000	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	DEVIDEN	3,154,600,000	0
14	2010	BANK RIAU	APBD 2010	P. MODAL	3,154,600,000	3,154,600,000	0	3,154,600,000	0	NIHIL	3,000,000,000	0
15	2013	PERUSDA	APBD 2013	P. MODAL	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	0	1,500,000,000
16	2013	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2013	P. MODAL	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	499,990,000
17	2014	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2014	P. MODAL	499,990,000	499,990,000	0	499,990,000	0	0	0	3,500,000,000
18	2015	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2015	P. MODAL	3,500,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000
19	2016	PDAM TIRTA NUSA	APBD 2016	P. MODAL	3,500,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	0	0	783,500,000
20	2017	BANK RIAU KEPRI	APBD 2017	P. MODAL	783,500,000	783,500,000	0	783,500,000	0	DEVIDEN	0	0

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan sampai T.A Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Telah Disertakan s.d. Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Telah Disertakan s.d. Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
21	2017	BANK RIAU KEPRI	APBD 2017	P. MODAL	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	DEVIDEN	0	5,000,000,000
22	2018	BANK RIAU KEPRI	APBD 2018	P. MODAL	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	DEVIDEN	0	5,000,000,000
				J U M L A H	106,069,741,021	101,069,741,021	5,000,000,000	106,069,741,021	0	0	37,654,600,000	68,415,141,021

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL



JUMLAH

No	Kode	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
			APBD TA n-1 <u>4</u>	Perubahan APBD TA n-1 <u>5</u>		APBD	Perubahan APBD
1	2	3			6	7	8
				N I L A I			
	J U M L A H						

ABDUL HAMID RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]

RIIPATI NATIINA

ABDIU HAMID RIZAL



LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				
	JUMLAH						

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL